

**PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA MODAL, JUMLAH PENDUDUK DAN KOMPLEKSITAS TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016-2020)**

Yehezkiel Silitonga¹⁾, Taufeni Taufik²⁾, Devi Safitri²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: yehezkiel2596@gmail.com

*The Influence Of Economic Growth Rate, Regional Original Income, Size Of Local Government, Capital Expenditure, Number Of Population And Complexity On The Internal Control System Of Local Government
(Empirical Study on Regency and City of Riau Province for Fiscal Year 2016-2020)*

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of locally generated economic growth income, size of government, mode of expenditure, population size and complexity with draw backs internal control. The objects of this research are the Provinces of Riau and West Sumatra 12 Regencies and Cities in Riau Province for the 2016-2020 fiscal year in the first and second semesters. The data were analyzed by linear regression method and SPSS program version versi 20. The variable under study is the rate of economic growth, which is generated locally income, government size, capital expenditure, population size and complexity with draw backs internal control. The results of the study show that the level of economic growth has an influence affect the weakness of internal control with a significance of 0,001, local revenue affects the weakness of internal control by 0.000 significantly, the size of the government affects the weakness of internal control by significance of 0.000, capital expenditure has no effect on internal weaknesses control with a significance of 0.000, the population has an effect on weakness internal control with a significance of 0.502 and complexity affects the weakness internal control with a significance of 0.136. The results of this study also show that the coefficient of R square is 29,4%. Each independent variable, giving a strong influence on the dependent variable, meaning that the independent variable can explain dependent variable well. While the rest is influenced by other variables not included in the regression model is not included in this study.

Keywords: internal control, level of economic growth, the size of the government, capital expenditure, the population and complexity

PENDAHULUAN

Banyaknya pemerintahan daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (fraud). Kecurangan dalam organisasi baik di sektor pemerintahan maupun di sector swasta

biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Berdasarkan *KPMG Fraud Survey 2010* ditemukan bahwa lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebesar 33% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Faktor kedua adalah diabaikannya

system pengendalian intern yang telah ada sebesar 24%.

Dari dua faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan pelaksanaan pengendalian intern sangat penting.

Hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya kelemahan intern yaitu adanya penerapan sistem desentralisasi pada sector pemerintahan yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dikeluarkannya regulasi tersebut akan menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau yang lebih populer disebut dengan otonomi daerah menjadikan kebutuhan akan pengendalian dalam menjalankan otonomi daerah sangat penting. Pengendalian dalam sebuah organisasi mutlak diperlukan untuk menanggulangi terjadinya kecurangan (fraud).

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2016 sebanyak 137 temuan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2016 dinyatakan bahwa temuan yang paling sedikit berada di Kabupaten Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti masing-masing sejumlah 5 temuan, sedangkan temuan yang paling banyak berada di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 19 temuan. Pada tahun 2017 sebanyak 97 temuan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2017 dinyatakan bahwa temuan yang paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 3 temuan, sedangkan temuan yang paling banyak berada di Pemerintahan Provinsi Riau sebanyak 16 temuan. Pada tahun 2018 sebanyak 88 temuan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2018 dinyatakan bahwa temuan yang paling sedikit berada di Kabupaten Indragiri

Hulu sebanyak 4 temuan, sedangkan temuan paling banyak berada di Pemerintahan Provinsi Riau sebanyak 21 temuan. Pada tahun 2019 sebanyak 87 temuan pemeriksaan, paling sedikit berada di Kabupaten Kampar sebanyak 4 temuan, sedangkan temuan paling banyak berada di Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2020 sebanyak 85 temuan pemeriksaan, paling sedikit berada di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 4 temuan, sedangkan temuan paling banyak berada di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi jumlah temuan atas pemeriksaan sistem pengendalian internal pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2016-2020 sebanyak 494 temuan pemeriksaan. Berdasarkan data diatas dapat dilihat temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terus menurun setiap tahunnya, namun belum bias mencapai titik nihil yang tentunya diharapkan dalam pengendalian internal pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi pedoman bagi pemerintah kota dan kabupaten dalam merancang sistem pengendalian intern (SPI) daerah mereka. SPI di desain untuk mampu mendeteksi adanya kelemahan yang dapat mengakibatkan permasalahan dalam aktifitas pengendalian, yang meliputi:

- a. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.
- b. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
- c. Kelemahan stuktur pengendalian intern.

Menurut Agoes (2012), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

- a. keandalan pelaporan keuangan,
- b. efektivitas dan efisiensi operasi,
- c. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan oleh BPK pada semester I tahun 2019, BPK memeriksa 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 dari 542 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2018 kabupaten/kota se-Indonesia telah menemukan 1.279 kasus kelemahan pengendalian intern. Kasus kelemahan pengendalian intern tersebut terdiri atas kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 520 kasus di pemda. Pemeriksaan dilakukan atas 212 objek pemeriksaan pada pemda. Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif. Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 1.765 temuan yang memuat 2.101 permasalahan senilai Rp6,50 miliar, yaitu 2.089 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp2,27 miliar, 7 permasalahan kerugian senilai Rp2,40 miliar, 1 permasalahan potensi kerugian senilai Rp440,19 juta, dan 4 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp1,39 miliar. Dengan kasus demikian maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memberikan sanksi yang tegas untuk mengurangi kasus-kasus yang menyebabkan kerugian daerah.

Demi mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, lembaga atau organisasi wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian

atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan berpedoman pada system pengendalian intern pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Menurut Mulyadi (2013) mendefinisikan pengendalian intern adalah meliputi struktural organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Banyak faktor yang dapat membuat pengendalian intern menjadi lemah, salah satu faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern adalah Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Todaro dan Smith, 2006).

Penelitian Martani dan Zaelani (2011), menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Dikarenakan pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak. Penelitian yang dilakukan oleh Lenni (2018), menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Karena dengan tinggi atau rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu daerah akan selalu ada keterbatasan-keterbatasan dalam pencapaian pengendalian internal yang ideal

Faktor lain yang mempengaruhi system pengendalian Intern yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah. PAD secara signifikan berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal.

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Petrovits (2010) yang menyatakan sumber pendapatan membuat masalah pengendalian internal dalam suatu organisasi meningkat. PAD berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal, sedangkan Fauza (2015) PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah yang memiliki PAD yang tinggi belum menjamin pengendalian internnya juga akan lebih baik dari pada Pemerintah Daerah yang memiliki PAD lebih rendah.

Faktor lain yang mempengaruhi sistem pengendalian Intern yaitu Ukuran Pemerintah Daerah. Ukuran pemerintah daerah (ukuran perusahaan) adalah skala dimana dapat diklasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain (Prasetyorini, 2013).

Ukuran (*size*) berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal (Iqbal, 2017). Sedangkan dalam penelitian (Fauza, 2015) menyatakan ukuran (*size*) tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Faktor lain yang mempengaruhi lemahnya sistem pengendalian Intern yaitu belanja modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk asset tetap berwujud yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Erlina dan Rasdianto, 2013).

Menurut (Lenni, 2018) berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal (2017) Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Faktor lain yang mempengaruhi sistem pengendalian internal yaitu Kompleksitas. Kompleksitas merupakan suatu tingkat kerumitan. Bila

kompleksitas dihubungkan dengan suatu organisasi maka dapat kita artikan sebagai berikut, semakin besar ukuran suatu organisasi semakin cenderung menjadi kompleks keadaannya.

Fauza (2015) menemukan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal.

Faktor lain yang mempengaruhi sistem pengendalian Intern yaitu Jumlah Penduduk. Penduduk atau warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau). Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-undang nomor 12 tahun 2006).

Puspitasari, et al (2013), menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan menurut Martani dan Zaelani (2011), menemukan bahwa jumlah penduduk dalam pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern? 2) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern? 3) Apakah Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern? 4) Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern? 5) Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern? 6) Apakah Kompleksitas berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern?

TELAAH PUSTAKA

Teori Agency (Agency Theory)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain

(agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 2015).

Pengendalian Intern

Menurut PP nomor 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hartono, et al. (2015), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang ingin dicapai pemerintah daerah. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah PAD secara signifikan berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian intern

yang lebih banyak (Martani dan Zaelani, 2011).

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah (Hartono 2015). Ukuran dalam sebuah entitas lazimnya digunakan sebagai suatu skala ukur dimana dapat diklasifikasikan ukuran besar kecilnya suatu entitas.

Size (ukuran) Pemerintah Daerah dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Semakin besar ukuran pemerintahan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda (Puspitasari, 2015).

Belanja Modal

Menurut Erlina dan Rasdianto (2018) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (Permendagri 33 Tahun 2019) disebutkan bahwa Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU).

Jumlah Penduduk

Penduduk atau warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-undang nomor 12 tahun 2006). Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dapat mencerminkan pengalokasian anggaran dari Pemerintah Pusat untuk setiap daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Kompleksitas

Kompleksitas adalah kualitas yang memungkinkan sesuatu tersusun dari sejumlah besar unsur, yang diatur secara lebih ketat di antara unsur-unsur itu. Kompleksitas bukanlah semata-mata soal besarnya unsur yang dikandung sesuatu hal, tetapi terlebih-lebih soal organisasi dari unsur itu (Bagus, 2015).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Menurut Novi Kumala Putri dan Amir Mahmud (2015) menemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini disebabkan Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari pengendalian intern yang dimiliki. Dengan naiknya aktivitas bisnis yang besar, organisasi cenderung memiliki pengendalian intern yang kurang baik. Hal ini tidak jauh berbeda dalam pemerintah daerah yang memiliki jumlah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan menaikkan tingkat aktivitas ekonomi dalam pemerintah

daerah tersebut. Organisasi nirlaba yang sedang tumbuh memiliki masalah kelemahan pengendalian intern yang lebih banyak (Petrovits, Shakespeare dan Shih, 2010). Hal tersebut yang dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi berpotensi menyebabkan tingginya kelemahan pengendalian intern. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memiliki kelemahan pengendalian yang tinggi juga, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama untuk penelitian ini adalah:

Ha₁ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern

Menurut Septian Bayu Kristanto (2009) menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa data PAD yang diperoleh dari Laporan Keuangan PEMDA Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali tahun anggaran 2006 tidak signifikan mempengaruhi kelemahan Pengendalian Internal. Kondisi ini dapat disebabkan karena sejak makin maraknya penangkapan pejabat daerah dan anggota DPRD ke pengadilan akibat kasus korupsi terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membuat PAD sebagai salah satu obyek korupsi mendapat perhatian khusus (pengawasan) dalam peruntukannya dengan tujuan agar PEMDA efektif melakukan kebijakan demi kepentingan rakyat banyak. Hal ini membuat para eksekutif dan legislatif bekerja sesuai amanat rakyat sehingga meminimalkan lemahnya Pengendalian Internal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua untuk penelitian ini adalah:

Ha₂ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern.

Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern

Menurut Fahroni (2015) menemukan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Ukuran (size) pada pemerintah daerah akan diprosikan dengan total aset yang merupakan kekayaan dari pemerintah daerah. Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menyadarkan pihak manajemen pemerintah terkait dengan peningkatan pengawasan terhadap aset. Pemerintah akan berusaha mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mengawasi aset daerahnya, sehingga mampu menurunkan tingkat fraud yang terjadi. Dibutuhkan sebuah pengawasan intern yang baik terhadap aset agar dapat terjaga dengan baik. Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah akan membuat pelatihan kepada setiap pegawai agar dapat mengimplementasikan pengendalian intern dengan baik dan benar.

Pemerintah daerah yang memiliki total aset yang tinggi memiliki kekhawatiran akan kelemahan pengendalian yang tinggi pula. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengendalian internal untuk mengurangi terjadinya kelemahan pengendalian internal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga untuk penelitian ini adalah:

Ha₃ : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern.

Belanja Modal berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern

Menurut Kristanto (2009) Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena semakin besar anggaran belanja modal yang tidak dimbangi dengan system pengendalian yang semakin baik maka akan banyak terjadi penyalahgunaan belanja modal sebagai objek korupsi oleh pihak legislatif dan eksekutif yang tidak bertanggungjawab. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan aset semakin tinggi. Tanpa pengendalian intern pemerintah yang baik kecurangan dan penyalahgunaan belanja modal lebih mudah dilakukan karena kurangnya pengawasan.

Menurut Nurwati (2015) menemukan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal bisa menjadi obyek korupsi politik dan administratif oleh pihak legislatif dan eksekutif. Dikarenakan belanja modal yang tinggi belum tentu sistem pengendalian internalnya semakin baik, dengan demikian mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyelewengkan belanja modal tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat untuk penelitian ini adalah:

Ha₄ : Belanja Modal berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern.

Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern

Menurut Ika Nurwati (2015) menemukan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini disebabkan Jumlah penduduk yang banyak akan membuat tekanan dan pengawasan terhadap pengendalian intern pemerintah daerah lebih besar.

Dengan demikian pemerintah daerah terdorong untuk memiliki sistem pengendalian internal yang memadai sebagai pertanggungjawaban publik. Hal ini berarti semakin banyak jumlah penduduk harus didukung oleh perkembangan teknologi, informasi baik di desa maupun kota.

Semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu provinsi membuat semakin kompleks pemerintah dikarenakan semakin banyak yang harus dilayani dan diatur, sehingga membuat pekerjaan pemerintah semakin rumit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kelima untuk penelitian ini adalah:

Ha₅ :Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern.

Pengaruh Kompleksitas terhadap Sistem Pengendalian Intern

Kompleksitas merupakan suatu tingkat kerumitan. Bila kompleksitas dihubungkan dengan suatu organisasi maka dapat kita artikan sebagai berikut, semakin besar ukuran suatu organisasi semakin cenderung menjadi kompleks keadaannya. Kompleksitas ini menyangkut berbagai hal seperti kompleksitas alur informasi, kompleksitas pembuat keputusan, kompleksitas pendelegasian wewenang, kompleksitas pekerjaan dan sebagainya. Kompleksitas pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek. Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan.

Menurut Fauza (2015) menemukan bahwa kompleksitas berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Hal ini dikarenakan ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompleksitas yang diukur dengan jumlah SKPD dengan kelemahan

pengendalian intern dan hubungannya bersifat positif. Artinya semakin banyak segmen atau cabang organisasi maka pengendalian intern yang terjadi akan semakin kompleks.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keenam untuk penelitian ini adalah:

Ha₆ :Pengaruh Kompleksitas terhadap Sistem Pengendalian Intern

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau periode 2016-2020. Yang menjadi objek penelitian ini adalah 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau tahun anggaran 2016-2020 di semester pertama dan kedua. Yang berarti sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 sampel. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2021 sampai selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau tahun anggaran 2016-2020 di semester pertama dan kedua.

Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positifisme, digunakan dalam meneliti sampel dan populasi penelitian, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak atau random sampling, sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif dan bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesa yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2014)

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. sumber data yang digunakan ialah data sekunder adalah data yang

mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011). Sebagai suatu penelitian empiris, maka dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku dan penelitian-penelitian terdahulu.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal.

Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Doyle et. Al 2007).

Dalam pelaksanaannya pertumbuhan ekonomi yang menjadi tolak ukur adalah *Gross National Product* (GNP) dan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Product Domestic Bruto*.

Pendapatan Asli Daerah (X2)

Menurut UU No. 9 Tahun 2015 PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Ukuran Pemerintah Daerah (X3)

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar

atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 2011). Ukuran pemerintah daerah dapat menggambarkan besar kecilnya skala pemerintah daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah *assets* atau aktiva yang dimiliki daerah tersebut (Hartono, 2014).

Belanja Modal (X4)

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, kemudian asset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk:

1. Belanja Modal Tanah (BMT).
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BMPM).
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BMGB).
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (BMJIJ).
5. Belanja Modal Fisik Lainnya (BMFL).

Jumlah Penduduk (X5)

Penduduk atau warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-undang nomor 12 tahun 2006). Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu yaitu bertambah atau berkurang. Menurut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Indikator dari jumlah penduduk terdiri dari Kelahiran, Angka Kematian dan Migrasi.

Kompleksitas (X6)

Kompleksitas adalah sifat dan sistem kompleks dimana sistem kompleks adalah sistem yang sulit

karena disusun oleh komponen-komponen penyusun yang saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan faktor-faktor global sistem yang menggambarkan dinamika evolusionernya (Dimitrov, 2013).

Metode Analisis Data

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam persamaan satu berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Sistem Pengendalian Internal

α = konstanta

β = koefisien regresi

X₁ = variabel Pertumbuhan Ekonomi

X₂ = variabel Pendapatan Asli Daerah

X₃=variabel budaya Ukuran pemerintah daerah

X₄ = variabel Belanja Modal

X₅ = variabel Jumlah Penduduk

X₆ = variabel Kompleksitas

e = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Riau selama periode penelitian yaitu dari tahun 2016-2020, dimana populasi penelitian berjumlah 60 (enam puluh). Sampel dalam penelitian ini sama dengan populasinya sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel Penelitian ini adalah 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau tahun anggaran 2016-2020 di semester pertama dan kedua. Yang berarti sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 sampel.

Hasil Uji Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19).

Hasil analisis deskriptif untuk variabel-variabel dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Max	Min	Mean	Std. Dev
TPE(X1)	60	.003	.097	.03232	.027449
PAD (X2)	60	.01	.32	.1217	.07643
UPD (X3)	60	2175 5727 5315	13900252 988120	5173956 291033.3 2	312439592 2471.376
BM (X4)	60	1265 7654 3	56301693 94895	2894814 78887.13	731017475 806.580
JP(X5)	60	91.08 8	951.683	505.5329 3	216.76381 8
KOM (X6)	60	22	32	27.50	2.977
SPI(Y)	60	4	12	6.88	1.958
Valid N(Listwise)	60				

Sumber : Data Olahan 2021

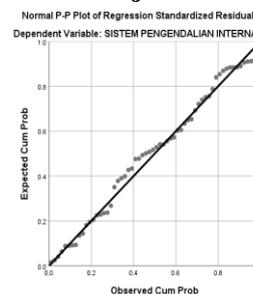
Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data, variabel terikat (*dependent*) dengan variabel bebas (*independent*) keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak.

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS yaitu gambar *Normal Probability Plot*.

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Data



Sumber : Data Olahan 2021

Pada gambar diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis

diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Suatu variabel dikatakan bebas dari penyimpangan multikolinieritas, apabila *tolerance value* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
TPE(X1)	0.830	1.205	Tidak terdapat Multikolinieritas
PAD (X2)	0.903	1.108	Tidak terdapat Multikolinieritas
UPD (X3)	0.923	1.084	Tidak terdapat Multikolinieritas
BM (X4)	0.814	1.229	Tidak terdapat Multikolinieritas
JP(X5)	0.866	1.155	Tidak terdapat Multikolinieritas
KOM (X6)	0.882	1.133	Tidak terdapat Multikolinieritas

Sumber : Data Olahan 2021

Dari perhitungan analisis data diatas, diperoleh nilai *tolerance* untuk seluruh variabel independen > 0,10 dan VIF < 10 . Maka dapat disimpulkan keseluruhan variabel independen tersebut bebas dari multikolinieritas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin-Watson*. (Sekaran, 2006).

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

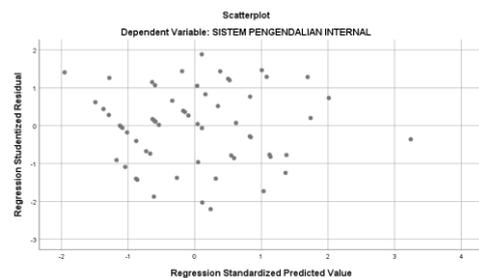
<i>Durbin-Watson</i> .	N	Keterangan
1.062	60	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber : Data Olahan 2021

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai *error*nya).

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan 2021

Dari grafik *scatterplot* pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis Regresi Linear Berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Hasil uji analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	Beta	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.939	1.309		4.535	0.000
TPE(X1)	-20.172	5.528	-0.283	-3.649	0.001
PAD (X2)	12.422	1.903	0.485	6.527	0.000
UPD (X3)	3.962E-13	0.000	0.632	8.603	0.000
BM (X4)	1.136E-12	0.000	0.424	5.421	0.000
JP(X5)	-0.00046341	0.001	-0.051	-0.676	0.502
KOM (X6)	-0.075	0.049	-0.114	-1.515	0.136

Sumber : Data Olahan 2021

- Variabel Tingkat pertumbuhan ekonomi mempunyai $t_{hitung} (-3.649) >$ dari $t_{tabel} (1.67356)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,001 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_1 diterima, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh terhadap sistem Pengendalian Intern (Y).
- Variabel pendapatan asli daerah mempunyai $t_{hitung} (6.527) >$ dari $t_{tabel} (1.67356)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0.001 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_2 diterima, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (X2) berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern (Y).
- Variabel ukuran pemerintahan mempunyai $t_{hitung} (8.603) >$ dari $t_{tabel} (1.67356)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0.000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_3 diterima, artinya ukuran pemerintahan berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintahan (X3) berpengaruh terhadap sistem Pengendalian Intern (Y).
- Variabel belanja modal mempunyai $t_{hitung} (5.421) <$ dari $t_{tabel} (1.67356)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0.000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_4 diterima, artinya belanja modal berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis keempat yang menyatakan bahwa belanja modal (X4) berpengaruh terhadap sistem Pengendalian Intern (Y).
- Variabel jumlah penduduk mempunyai $t_{hitung} (-0.676) >$ dari $t_{tabel} (1.67356)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0.502 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_5 ditolak, artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis kelima yang menyatakan bahwa jumlah penduduk (X5) tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y).
- Variabel kompleksitas mempunyai $t_{hitung} (-1.515) >$ dari $t_{tabel} (1.67356)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0.136 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_6 ditolak, artinya kompleksitas tidak berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis keenam yang menyatakan bahwa kompleksitas (X6) berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Y).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0(nol) dan 1 (satu).

Berdasarkan proses pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.858 ^a	.736	.706	1.062

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Adjusted R Square 0.706 artinya adalah persentase pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Ukuran Pemerintah Daerah (X3), Belanja Modal (X4), Jumlah penduduk (X5), dan

Kompleksitas (X6) terhadap Sistem Pengendalian Internal adalah sebesar 70,6 %. Sedangkan sisanya 29,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian yaitu variabel Jumlah Kecamatan, Ketidapatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan dan Lingkungan Pengendalian.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengendalian internal akan semakin membaik kedepannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (X2) berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern (Y). Artinya, semakin baik pendapatan asli suatu daerah, maka sistem pengendalian intern semakin baik pula. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintahan (X3) berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern (Y). Artinya semakin besar ukuran suatu pemerintahan daerah, maka

akan semakin tinggi tingkat pengendalian intern pada pemerintahan daerah tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintahan berpengaruh terhadap sistem Pengendalian Intern.

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Belanja Modal (X4) berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern (Y). Artinya semakin tinggi pemerintah dalam melakukan belanja modal, maka akan semakin tinggi resiko yang didapatkan oleh pemerintah daerah dalam mengelola belanja modal daerah dan meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintahan daerah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dan penurunan belanja modal akan mempengaruhi terjadinya kasus sistem pengendalian intern.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk (X5) tidak berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern (Y). Artinya semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin tinggi pengawasan terhadap sistem pengendalian intern suatu pemerintahan daerah.
6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa kompleksitas (X6) tidak berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Intern (Y). Artinya semakin banyak jumlah OPD yang ada di daerah tersebut otomatis harus meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah daerah tersebut.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada keterbatasan yang dialami untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti kedepannya agar lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki

pada penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya dilakukan pada 60 sampel pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperbesar populasi, sampel dan menambahkan moderasi atau intervening. Sehingga hasil yang didapat mungkin akan menimbulkan perbedaan apabila dilakukan pada jenis organisasi yang berbeda seperti pada perusahaan dan juga organisasi sektor publik lainnya.

Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu :

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan sistem pengendalian internal yang ada di provinsi riau serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang pemerintahan daerah (melakukan penelitian) maka perlu modifikasi variabel-variabel independen baik menambah variabel atau menambah *time series* datanya. Sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian.
2. Bagi pemerintah daerah Provinsi Riau, sebagai acuan dalam pengambilan keputusan tentang variabel-variabel yang diteliti dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih memperhatikan Sistem Pengendalian Internal pada pemerintahan daerah tersebut.
3. Diharapkan perlu dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan memasukkan variabel lainnya yang mempengaruhi Sistem Pengendalian Intern sehingga mendapatkan hasilnya akan lebih baik. Meskipun dalam konteks yang kecil, namun hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat

bagi suatu perusahaan, bagi masyarakat dan para ilmuwan untuk lebih memahami tentang variable-variabel yang di teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012. "Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik". Jilid 1, Edisi 4, Jakarta: Salemba empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019.(2020). <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2020.
- Doyle, Ge, Weili dan McVay. (2007). Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. Working paper, Utah State University, University of Washington, dan New York University.
- Erlina, Rasdianto, 2013, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Penerbit Brama Ardian.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro".
- <https://pekanbaru.bpk.go.id/?p=39312>
- Iqbal, Muhammad, 2017, "Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah". Jurnal Akuntansi. Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau.

- Kristanto, Septian Bayu (2009). "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern". *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, Volume 9, No.1
- Lenni Mustika Sari, 2018, "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah".
- Martani, Dwi dan Fazri Zaelani. 2011. "Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XXIV*.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Nurwati, Ika. 2015. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Petrovits, Christine , Shakespeare, Chaterine dan Shih, Aimee. (2010). *The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations*. *Accounting Review*, Jan2010, Vol. 86 Issue 1.
- Prasetyorini, Bhekti Fitri. 2013. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan". *Jurnal Ilmu Manajemen*. 1(1).183-196. <http://ejournal.unesa.ac.id/>. (diakses tanggal 11 Juni 2020).
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2013. "Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013". *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*. Semarang. Republik Indonesia. 2014. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Sugiyono. 2008. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung : ALFABETA
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi* (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga